

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	NERACA	2	19-08-2002

Mulai 2003 Harga BBM Jadi 100% Harga Pasar

* Tarif listrik naik rata-rata 6% per triwulan

Jakarta,NERACA

Mulai tahun anggaran 2003, pemerintah akan menghapus semua subsidi bahan bakar minyak (BBM), kecuali minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, harga BBM akan naik dari rata-rata 75% harga pasar menjadi 100%. Selain itu, pada 2003 pemerintah juga melanjutkan pengurangan subsidi listrik melalui penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) bertahap yaitu rata-rata 6% setiap triwulan.

Dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2003 yang disampaikan Presiden Megawati Jumat pekan lalu (16/8) terungkap, pemerintah menurunkan patokan harga minyak dari US\$ 22 per barel menjadi US\$ 20,5 per barel. Bersamaan dengan itu, alokasi untuk subsidi BBM pada RAPBN 2003 turun 55,6% menjadi Rp 13,6 triliun dibandingkan APBN 2002 sebesar Rp 30,4 triliun.

Megawati menyatakan, kebijakan itu terpaksa ditempuh dalam rangka penghematan anggaran negara yang masih sangat terbatas, mengingat subsidi BBM selama ini kurang tepat sasaran. Selain itu, harga BBM yang terlalu rendah cenderung mendorong terjadi-

nya penyimpangan dan penyalahgunaan BBM. Seperti pemborosan, penyelundupan, pengoplosan serta menghambat upaya diversifikasi dan konservasi energi. Melalui kebijakan ini, pengeluaran negara untuk subsidi dapat dihemat Rp 10 triliun.

Untuk listrik, menurut perhitungan pemerintah, masih dibutuhkan subsidi Rp 4,1 triliun atau 0,2% PDB (produk domestik bruto). Jumlah ini hampir sama dengan subsidi listrik tahun 2002. Pemberian subsidi listrik akan diprioritaskan bagi pelanggan sosial, rumah tangga bisnis dan industri dengan penggunaan daya di bawah 900 watt. Dengan mengurangi subsidi listrik diharapkan pemerintah bisa menghemat Rp 1,1 triliun.

Hasil penghematan subsidi energi itu akan digunakan secara langsung membantu mengurangi beban rakyat kurang mampu melalui penyediaan dana kompensasi sosial. "Dalam tahun 2003 akan disediakan lagi dana kompensasi sosial yang ditampung dalam anggaran pembangunan," katanya.

Tahun depan pemerintah masih tetap mengalokasikan dana untuk subsidi pangan yang akan diarahkan untuk menjamin distribusi dan

ketersediaan beras dengan harga terjangkau. Subsidi ini akan disalurkan melalui program beras untuk masyarakat miskin (Raskin). "Tahun 2003 program Raskin akan mendapat alokasi dana Rp 4,8 triliun, yang di targetkan bisa menjangkau sekitar 9,2 juta keluarga kurang mampu," kata Megawati.

Secara keseluruhan, pada RAPBN 2003 pemerintah mengalokasikan dana subsidi Rp 25,3 triliun, atau turun sekitar 39% dibandingkan APBN 2002 sebesar Rp 41,6 triliun. Rinciannya, Rp 13,6 triliun untuk subsidi BBM dan Rp 11,8 triliun untuk subsidi non-BBM.

Bebani Rakyat

Anggota Komisi VIII DPR Priyo Budi Santoso menyayangkan rencana pemerintah menghapus subsidi BBM pada 2003 sebab hal itu hanya akan membebani masyarakat. Apalagi, kata Priyo, tarif dasar listrik pun naik 6% secara bertahap setiap triwulannya. "Pastinya ini akan membebani rakyat. Walaupun ada dana kompensasi, itu tidak mencukupi," kata Priyo.

Dia takut, beban berat ini dapat menyebabkan inflasi makin besar. Bukan tidak mungkin, laju inflasi pada 2003 bisa jauh melebihi tar-

get pemerintah sebesar 8%. "Jadi asumsi pemerintah terbalik dengan menghapus subsidi. Padahal inilah yang menyebabkan inflasi makin besar. Bahkan bukannya tidak mungkin inflasi mencapai 10%," katanya.

Secara terpisah, pengamat perminyakan Kartubi menilai, asumsi harga minyak dalam RAPBN 2003 sangat konservatif. Menurut perkiraan Kartubi, tahun depan harga minyak di pasar internasional bisa mencapai US\$ 23-US\$ 24 per barel jauh di atas prediksi pemerintah US\$ 20,5 per barel. "Asumsi itu sangat konservatif. Sepertinya pemerintah sangat berhati-hati dan tidak sesuai dengan realitas," katanya.

Saat ini, lanjut dia, organisasi produsen minyak dunia (OPEC) mematok harga di kisaran US\$ 22-US\$ 28 per barel. Hampir dipastikan OPEC akan berusaha semaksimal mungkin mencapai target itu.

"Lagipula, kalau asumsi harga minyak sedemikian rendah, apakah yang akan diperjuangkan Pemerintah di forum OPEC? Pemerintah tidak akan berjuang maksimal untuk mencapai target, karena asumsi yang dibuat jauh dari target minimal OPEC," demikian pendapat Kurtubi. (yog/ra/15)